

Perubahan Kebijakan Iklim Inggris Terkait Target *Net Zero Emission Global*

Raihan Haniq¹, Apriwan², Rifki Dermawan³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: raihanhaniq10@gmail.com¹, apriwan@fisip.unand.ac.id²,
rifkidermawan@soc.unand.ac.id³

Abstract

This research was conducted to see changes in UK policy related to the Net Zero Emission target analyzed using the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson by looking at the factors that influence UK policy changes and the level of policy change. There are two factors, namely international factors and domestic factors seen from an economic and political perspective. Meanwhile, the level of policy change consists of four levels, namely Adjustment Changes, Program Changes, Problem/Goal Changes, and International Orientation Changes. This research uses descriptive qualitative methods. In this study, international factors in terms of the economy are caused by the decline in the global economy due to Covid-19, and in terms of politics is the conflict between Russia and Ukraine. As for domestic factors in terms of the economy is inflation in the UK, and domestic factors in terms of politics is the change of prime minister and political parties. Then, the level of policy change is at the level of Problem/Goal Changes and International Orientation Changes. Broadly speaking, the UK has not changed its target towards Net Zero Emission Global, but the existing policy changes can affect the UK's achievement of the target.

Keywords: *Climate Change, Foreign Policy Change, Net Zero Emission, UK*

PENDAHULUAN

Intensitas perubahan iklim terus meningkat setiap tahun karena emisi gas rumah kaca tidak terkontrol, terutama karbon dari kegiatan industri. Masyarakat global menanggapi ini sebagai permasalahan serius dan pada COP21 tahun 2015 di Paris, *Paris Agreement* dibentuk dengan tujuan menahan kenaikan suhu bumi, melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, meninjau upaya negara setiap lima tahun dan memberikan bantuan dana

kepada negara berkembang (Robert Falkner, 2016). Paris Agreement mengandung komitmen global untuk mengurangi emisi sesuai dengan kemampuan setiap negara, sehingga dengan munculnya konsep *Net Zero Emission*, target global untuk mengurangi produksi emisi agar suhu bumi tidak naik. Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut, negara-negara yang berkomitmen tersebut membentuk koalisi yang bernama *Net Zero Coalition*, yang dibentuk untuk mencapai *Net Zero Emission*, melibatkan lebih dari 70 negara, termasuk Inggris (United Nations, 2015).

Inggris sebagai kontributor emisi terbesar, berkomitmen pada target *Net Zero Emission*. Meskipun telah mengurangi emisi karbon dari 2015 hingga 2019, terutama dengan menutup tambang batu bara pada 2016 (VOA, 2015), Inggris masih merupakan produsen emisi terbesar di Eropa. Langkah-langkah kebijakan termasuk penandatanganan Paris Agreement pada 2015, ratifikasi pada 2016, dan amandemen Climate Change Act pada 2019 untuk menetapkan target *Net Zero Emission* pada 2050 (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2016).

Namun, Inggris menghadapi kritik terkait kebijakan yang tidak mendukung target tersebut. Pada 2020, pengurangan anggaran bantuan luar negeri untuk perubahan iklim dan pembukaan kembali tambang batu bara di Cumbria menuai kontroversi (Brien & Loft, 2021). Pembukaan tambang tersebut dinilai dapat meningkatkan emisi dan bertentangan dengan NDC Inggris dalam Paris Agreement (BBC, 2022). Meskipun Inggris telah mengambil langkah-langkah positif menuju target *Net Zero Emission*, kebijakan kontroversial dan langkah-langkah yang bertentangan menunjukkan tantangan dan perubahan dalam implementasi kebijakan iklim.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif (Muhtar Masoed, 1990). Penelitian difokuskan pada perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission*. Penelitian ini bersifat

deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan fenomena perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission*. Batasan waktu penelitian adalah tahun 2020 hingga 2022, melibatkan periode penting seperti disepakatinya Paris Agreement, ratifikasi oleh Inggris, amandemen Undang-Undang Perubahan Iklim 2008, pengurangan pendanaan untuk perubahan iklim, dan izin penambangan batu bara di Cumbria. Untuk fokus penelitian ini, unit analisisnya adalah Inggris, sedangkan unit eksplanasinya adalah perubahan kebijakan terkait *Net Zero Emission* dengan tingkat analisis pada level sistem internasional (J. David Singer, 1961).

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, termasuk buku-buku seperti "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi" oleh Mohtar Masoed, dan artikel jurnal ilmiah seperti "Explaining Foreign Policy Change" oleh Vincensio Dugis. Selain data dari artikel jurnal, data juga diambil melalui dokumen dan laporan resmi, termasuk situs resmi pemerintah Inggris, UNFCCC, Paris Agreement, dan portal berita nasional dan internasional. Pengumpulan data terkait topik penelitian dimulai dengan pemilahan dan penjabarkan data. Analisis menggunakan konsep Foreign Policy Change oleh Jakob Gustavsson, dengan fokus pada faktor-faktor perubahan kebijakan luar negeri dan tingkatan perubahan kebijakan. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan kebijakan iklim Inggris sepanjang periode yang ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan dari Katharina Rietig dan Timothy Laing yang berjudul *Policy Stability in Climate Governance: The 8 case of the United Kingdom* menjadi tinjauan pustaka dalam tulisan ini. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana Parlemen Inggris membuat sebuah kebijakan terkait isu perubahan iklim dan bagaimana Inggris mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan sebuah kebijakan perubahan iklim yang telah dibuat. Inggris membuat sebuah kebijakan besar untuk mengurangi hampir 100% dari emisi

karbon di negaranya pada tahun 2050. Dalam tulisannya ini, penulis menjelaskan tentang dua faktor yang menjadi penentu dari kestabilan kebijakan perubahan iklim, yang pertama yaitu sistem politik dan yang kedua adalah opini publik. Pada tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa kebijakan Inggris untuk membuat sebuah undang-undang perubahan iklim merupakan kebijakan yang dapat dikatakan stabil untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, ketidakstabilan juga dapat terjadi pada sistem politik parlementer Westminster yang diterapkan oleh Inggris, seperti kasus pengunduran diri perdana menteri, kemudian adanya konsensus untuk opini publik Inggris yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Peneliti melihat bahwa tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem politik dan opini publik sangat berpengaruh dalam penerapan dan kestabilan kebijakan perubahan iklim di Inggris. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagian pembahasan di mana artikel tersebut menjelaskan tentang faktor faktor yang mempengaruhi stabilitas kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di Inggris

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iklim Inggris Terkait Target *Net Zero Emission* Global

Penelitian ini memaparkan temuan terkait perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission* global. Sebuah kebijakan luar negeri dibuat dan disepakati oleh aktor yang berperan seperti raja, presiden, perdana menteri dan kabinet, hingga pakar sesuai bidangnya (Williams, 2004). Kebijakan luar negeri dapat mengalami perubahan dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pergantian pemimpin negara, hasil keputusan mayoritas masyarakat pada Negara demokratis, hingga faktor eksternal yang berasal dari luar Negara seperti konflik internasional. Untuk melihat secara lebih spesifik, faktor perubahan kebijakan iklim Inggris terbagi atas dua yaitu faktor internasional dan faktor domestik.

1. Faktor Internasional

1.1 Faktor Internasional Segi Ekonomi

Faktor pertama yang memengaruhi perubahan kebijakan iklim Inggris pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan kondisi ekonomi sulit secara global dan mempengaruhi Inggris dalam beberapa aspek. Kemudian hal ini berdampak pada perekonomian global dimana Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif pada perekonomian global, termasuk Inggris. Kebijakan lockdown dan pembatasan internasional mengakibatkan hambatan dan kekacauan dalam aktivitas ekonomi. Inggris mengalami tingkat kasus Covid-19 yang cukup tinggi pada tahun 2020 (WHO, 2022), menyebabkan penutupan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pembatasan perjalanan, dan aktivitas bisnis antar negara.

Dampak yang ditimbulkan oleh kemunduran ekonomi selama pandemi covid 19 secara global membuat Inggris memutuskan untuk membuat beberapa kebijakan. Pada tahun 2020, Inggris melakukan pengurangan bantuan luar iklim negeri kepada negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kesulitan ekonomi, pemerintah Inggris mengambil kebijakan mengurangi anggaran bantuan luar negeri, termasuk bantuan iklim dan penanganan kemiskinan. Bantuan yang sebelumnya mencapai 0,7% dari pendapatan nasional dikurangi menjadi 0,5 (Barber & Boycott-Owen, 2022). Pemerintah Inggris mengalokasikan dana yang dikurangi dari bantuan luar negeri untuk penanganan pandemi, termasuk pendanaan program vaksin, infrastruktur kesehatan, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak (May, 2020).

Seiring dengan kebijakan baru Inggris ini, muncul kritik dan aksi protes dimana para aktivis lingkungan menyangkan keputusan Inggris untuk mengurangi bantuan luar negeri, terutama terkait iklim, mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk badan bantuan, karena dianggap mengesampingkan permasalahan iklim dan kesejahteraan negara

berkembang. Selain mengurangi bantuan luar negeri, Inggris juga tidak tepat waktu pembayaran dana iklim, di mana krisis ekonomi akibat pandemi menjadi alasan Inggris tidak membayarkan pendanaan iklim sebesar 300 juta dolar pada COP 27 tahun 2021 (McVeigh, 2022), menimbulkan protes karena dianggap sebagai keputusan yang tidak tepat pada saat yang krusial. Perubahan kebijakan ini menciptakan ketidaksetujuan dan kekecewaan terhadap Inggris, terutama dalam konteks peranannya sebagai negara maju dan penyelenggara COP 26 sebelumnya.

1.2 Faktor Internasional Segi Politik

Konflik Rusia-Ukraina menjadi faktor internasional dari segi politik. Konflik dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia menyerang Ukraina (Kemlu, 2022). Ini menjadi serangan terbesar di Eropa setelah Perang Dunia II dan memicu perhatian global. Banyak negara, termasuk Inggris, memberikan sanksi kepada Rusia sebagai respons terhadap invasi militer. Inggris, bersama sekutu seperti Perancis, Amerika Serikat, dan lainnya, mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Inggris memberlakukan sanksi, termasuk menghentikan impor energi batu bara dari Rusia sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina dan tekanan kepada Rusia (UKGOV, 2023.)

Inggris mengeluarkan peraturan yang melarang impor minyak, produk minyak, batu bara, produk batu bara, dan emas dari Rusia. Langkah ini diambil untuk mendesak Rusia menghentikan invasi dan sebagai respons terhadap konflik politik internasional (UKGOV, 2023). Penghentian impor batu bara dari Rusia berdampak signifikan pada ekonomi Inggris, terutama dalam pemenuhan kebutuhan energi. Meskipun awalnya dianggap sebagai sanksi efektif, Inggris kemudian menghadapi krisis cadangan batu bara dan terpaksa membuka tambang baru di Cumbria pada akhir 2022. Seiring dengan penutupan tambang batu bara sebelumnya, Inggris berupaya mengurangi ketergantungan

pada bahan bakar tersebut. Namun, dampak sanksi membuat Inggris menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan energi, sehingga mengizinkan pembukaan tambang batu bara galian dalam di Cumbria.

Faktor ini menunjukkan bahwa konflik politik internasional dapat memiliki dampak besar pada kebijakan ekonomi dan energi suatu negara, memaksa negara tersebut untuk melakukan perubahan signifikan dalam strategi impornya.

2. Faktor Domestik

2.1 Faktor Domestik Segi Ekonomi

Faktor domestik pertama yang mempengaruhi perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target Net Zero Emission adalah inflasi (Francis-Devine et al., 2023). Inflasi, yang terjadi selama pandemi Covid-19, menjadi dasar pembentukan keputusan pemerintah Inggris untuk mengurangi anggaran bantuan luar negeri iklim dan gagal membayarkan dana perubahan iklim pada COP 27 di Mesir pada tahun 2022. Inflasi di Inggris mencapai tingkat tertinggi dalam 30 tahun terakhir, mempengaruhi sektor-sektor utama seperti bahan makanan, jasa, dan sumber energi (Nicholls, 2022). Tingkat inflasi meningkat dari 0,851% pada tahun 2020 menjadi 9,067% pada tahun 2022 setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 (Rate Inflation, 2023). Inflasi yang tinggi menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang memaksa Inggris untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan, termasuk pengurangan anggaran bantuan dan penundaan pembayaran dana perubahan iklim.

Inflasi yang meningkat secara signifikan di Inggris selama beberapa bulan menciptakan peningkatan harga barang dan jasa, terutama di tengah pandemi dan musim dingin. Kondisi sulit ini diperparah oleh kebutuhan masyarakat akan bahan bakar sebagai sumber energi pemanas ruangan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Inggris memutuskan untuk membuka kembali tambang batu bara Cumbria. Hasil

tambang ini akan digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sebagian akan menjadi bahan bakar industri baja, dan sebagian lainnya akan diekspor untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Meskipun keputusan membuka tambang batu bara diambil sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi selama pandemi, langkah ini bertentangan dengan komitmen Inggris terhadap target *Net Zero Emission* global. Data dari UNFCCC menunjukkan bahwa pabrik baja menyumbang 2,7% emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, dari total emisi di Inggris pada tahun 2019. Dengan membuka tambang batu bara untuk industri baja, Inggris berisiko tidak mencapai target pengurangan emisi sebesar 78% pada tahun 2035, sesuai dengan komitmen *Net Zero Emission* (BBC, 2022).

2.2 Faktor Domestik Segi Politik

Pergantian pemimpin yang mana salah satunya adalah perdana menteri, memiliki dampak signifikan pada kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk kebijakan iklim di Inggris. Inggris, sebagai monarki konstitusional, dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara, sementara perdana menteri, kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan umum (UK Parliament, 2023). Pergantian perdana menteri di Inggris sejak 2015 hingga 2022, yang terjadi empat kali, memberikan pengaruh terhadap kebijakan iklim. Masing-masing perdana menteri memiliki pemikiran dan prioritas yang berbeda, mempengaruhi arah kebijakan negara. Berikut adalah perdana menteri Inggris dan kebijakan terkait iklim yang diambil dari 2015 hingga 2022 (University of Oxford, 2023).

Pertama adalah David Cameron di mana Inggris ikut serta dalam COP 21 dan menandatangani Paris Agreement (Falkner, 2016) dan menutup tambang batu bara Kellingley (VOA, 2015). Berikutnya ada Theresa May yang meratifikasi Paris Agreement ke dalam undang-

undang nasional dan berkomitmen untuk mengurangi emisi global dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2050 (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2016). Selanjutnya Boris Johnson dengan mengamandemen Climate Change Act 2008 dan penyesuaian bantuan luar negeri dengan Paris Agreement (Dray, 2021). Namun pada tahun 2020 Johnson mengurangi bantuan luar negeri kepada negara berkembang dari 0,7% menjadi 0,5%. Kemudian setelah Johnson mengundurkan diri, Liz Truss melanjutkan kebijakan perdana menteri sebelumnya dan hanya menjabat sekitar 2 bulan. Kemudian perdana menteri yang tengah menjabat yaitu Rishi Sunak, di mana ia meresmikan pembukaan tambang batu bara baru dan tidak membayarkan bantuan luar negeri iklim pada Green Climate Fund sebesar 300 juta dolar atau 260 pound sterling dan membuka tambang batu bara Cumbria (Harvey, 2022).

Selanjutnya disebabkan oleh partai politik yang mendominasi, Inggris memiliki dua partai dominan yang memainkan peran utama dalam pemerintahan, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sejak tahun 2010 hingga 2023, posisi perdana menteri Inggris diisi oleh perwakilan Partai Konservatif, termasuk David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, dan perdana menteri terbaru Rishi Sunak (UKGOV, 2022). Partai Konservatif, meskipun memiliki fokus pada isu perubahan iklim, lebih dikenal dengan orientasinya terhadap perekonomian. Dalam mengatasi perubahan iklim, partai ini menyatakan bahwa ekonomi berbasis rendah karbon akan membuka peluang bisnis baru dan memberikan keuntungan bagi negara (Båtstrand, 2015). Namun, pandangan terhadap partai ini terbagi, di mana beberapa menilai kurangnya ambisi dalam isu perubahan iklim, terutama terkait target *Net Zero Emission*.

Pergantian perdana menteri selama satu dekade terakhir dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan iklim di

Inggris. Dalam hal ini, partai konservatif memainkan peran kunci, dan perubahan kebijakan iklim terlihat seiring dengan transisi kepemimpinan. Keputusan pengurangan bantuan luar negeri Inggris pada tahun 2020, yang berdampak pada perubahan kebijakan terkait bantuan luar negeri untuk perubahan iklim, juga terkait dengan keputusan mayoritas parlemen yang didominasi oleh anggota partai konservatif (Webber, 2021). Secara keseluruhan, faktor politik domestik, terutama terkait kepemimpinan dan kebijakan partai konservatif, diidentifikasi sebagai faktor paling berpengaruh dalam mendorong perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission* Global.

B. Level Perubahan Kebijakan Iklim Inggris

Perubahan kebijakan iklim Inggris pada masa pemerintahan Boris Johnson hingga Rishi Sunak (2020-2022) menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan luar negeri. Sebelum tahun 2020, Inggris telah mengadopsi kebijakan yang mendukung target *Net Zero Emission* pada tahun 2050, dengan penutupan tambang batu bara dan bantuan luar negeri untuk negara berkembang. Namun, sejak tahun 2020, Inggris mulai mengambil langkah-langkah yang tidak sejalan dengan komitmen sebelumnya. Pengurangan bantuan luar negeri dan penolakan pembayaran dana iklim pada COP 27 di Mesir menunjukkan perubahan kebijakan luar negeri yang dapat memperlambat pencapaian target *Net Zero Emission*. Keputusan terbaru untuk membuka tambang batu bara Cumbria menunjukkan perubahan tujuan, yang semakin menjauhkan Inggris dari target global tersebut.

Dalam mengkategorikan tingkat perubahan kebijakan iklim, dapat dilihat dari beberapa kategori yaitu *Adjustment Changes*, di mana embuatan kebijakan baru terkait isu perubahan iklim, yang sebelumnya belum ditetapkan dengan pasti. Kedua adalah *Program Changes*, sebuah perubahan langkah-langkah atau instrumen dalam mencapai tujuan

kebijakan luar negeri yang sudah ada. Ketiga adalah *Problem/Goal Changes*, terjadinya perubahan dasar dari kebijakan luar negeri terkait suatu isu, termasuk perubahan tujuan pemerintah. Keempat adalah *International Orientation Changes*, perubahan kebijakan luar negeri yang melibatkan aktor global, termasuk organisasi internasional dan perjanjian internasional (Gustavsson, 1999).

Dalam konteks perubahan kebijakan iklim Inggris, terlihat bahwa kebijakan pengurangan bantuan luar negeri dan pembukaan kembali tambang batu bara Cumbria berada pada tingkat *International Orientation Changes*. Keputusan ini mempengaruhi dan melibatkan berbagai aktor di tingkat global dan melibatkan negara penerima bantuan serta komunitas internasional yang peduli terhadap isu perubahan iklim.

Pada akhirnya, perubahan kebijakan iklim Inggris tampaknya telah melibatkan beberapa tingkat perubahan, dari pengurangan bantuan luar negeri hingga pembukaan kembali tambang batu bara. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, memainkan peran penting dalam dinamika perubahan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Inggris sebagai negara maju menghadapi dampak perubahan iklim dan berkomitmen mencapai target *Net Zero Emission* sebagai bagian dari upaya global dalam Paris Agreement. Langkah-langkah awalnya melibatkan meratifikasi Paris Agreement, memberikan bantuan luar negeri iklim, dan menutup tambang batu bara sebagai tindakan konkrit untuk mengurangi emisi. Namun, pada tahun 2020, Inggris mulai mendapat kritik karena perubahan kebijakan iklim yang kontroversial. Pengurangan anggaran bantuan luar negeri dan kebijakan membuka kembali tambang batu bara di Cumbria menimbulkan pertanyaan terkait komitmen Inggris terhadap target *Net Zero Emission*. Perubahan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internasional dan domestik. Secara internasional, penurunan ekonomi global akibat pandemi

Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina memainkan peran signifikan. Faktor domestik mencakup inflasi yang signifikan, yang dianggap sebagai alasan untuk pengurangan anggaran bantuan luar negeri. Selain itu, kurangnya komitmen penuh dari partai konservatif terhadap isu perubahan iklim tercermin dalam pengurangan anggaran tersebut. Dengan menggunakan konsep tingkat perubahan kebijakan oleh Jakob Gustavsson, dapat disimpulkan bahwa Inggris mengalami perubahan pada tingkat *International Orientation Changes* untuk kebijakan pengurangan bantuan luar negeri dan tingkat *Problem/Goal Changes* untuk kebijakan membuka kembali tambang batu bara Cumbria.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Institute of Health and Welfare. 2018. Physical activity across the life stages. Canberra, Australia: Author.
- Barber, H., & Boycott-Owen, M. (2022). UK the only G7 country to cut aid during Covid pandemic. The Telegraph. <https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/uk-g7-country-cut-aid-covid-pandemic/>
- Båtstrand, S. (2015). More than Markets: A Comparative Study of Nine Conservative Parties on Climate Change. *Politics & Policy*, 43(4), 538–561. <https://doi.org/10.1111/polp.12122>
- BBC. (2022, April 11). Cumbria coal mine: What is the controversy about? BBC News. <https://www.bbc.com/news/explainers-56023895>
- Brien, P., & Loft, P. (2021). Reducing the UK's aid spending in 2021. Commonslibrary.parliament.uk. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9224/>
- David. Singer J. 1961. "The Level Analysis Problem in International Relations", *World Politics* 14, no. 1, 1961. Hal. 77-92
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (2016, November 18). UK ratifies the Paris Agreement. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-paris-agreement>
- Dray, S. (2021). Climate change targets: the road to net zero? House of Lords Library. <https://lordslibrary.parliament.uk/climate-change-targets-the-road-to-net-zero/>

- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125.
- Francis-Devine, B., Harari, D., Keep, M., Bolton, P., Barton, C., & Wilson, W. (2023). Rising cost of living in the UK. House of Commons Library, 9428(1). <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9428/>
- Gustavsson, J. (1999). “How Should We Study Foreign Policy Changes?” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 503, Issue 1.
- Harvey, F. (2022, December 7). Cumbria coalmine approval shows Sunak does not care if he is seen as green. The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/07/cumbria-coalmine-approval-shows-sunak-does-not-care-if-he-is-seen-as-green>
- Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring): 1–34. <https://doi.org/10.1086/690235>.
- Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” *New York Times*, March 8, 2017. <https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html>.
- May, L. (2020). Boris Johnson “plans to cut foreign aid by £5bn.” Mail Online. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8956043/Boris-Johnson-plans-cut-foreign-aid-5billion-help-meet-Britains-210bn-Covid-bill.html>
- McVeigh, K. (2022). UK criticised for failing to pay \$300m in promised climate funds ahead of Cop27. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/01/uk-criticised-for-failing-to-pay-300m-in-promised-climate-funds-ahead-of-cop27#:~:text=The%20UK%20misses%20its%20September>
- Mohtar Mas’oed. “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi”. Jakarta: LP3ES. Hal 39
- Nicholls, H. (2022, October 29). UK PM Sunak could freeze foreign aid for two more years, the Telegraph reports. Reuters.

<https://www.reuters.com/world/uk/rishi-sunak-could-freeze-foreign-aid-telegraph-2022-10-28/>

Rate Inflation. (2023, May). UK Historical Inflation Rates - 1988 to 2020. [Www.rateinflation.com.](https://www.rateinflation.com/) <https://www.rateinflation.com/inflation-rate/uk-historical-inflation-rate/>

Smith, Zadie. 2016. *Swing Time*. New York: Penguin Press.

Thoreau, Henry David. 2016. "Walking." In *The Making of the American Essay*, edited by John D'Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.

UK Parliament. (2023). General elections. UK Parliament. <https://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/general/>

UKGOV. (2023, April 23). NTI 2953: Russia import sanctions. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-importers-2953-russia-import-sanctions/nti-2953-russia-import-sanctions#:~:text=The%20prohibition%20on%20the%20import>

UKGOV. (n.d.). Russia sanctions: guidance. GOV.UK. Retrieved July 4, 2023, from <https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance>

United Nations. (2015). Net Zero Coalition. United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=Yes%2C%20a%20growing%20coalition%20of>

University of Oxford. (2023). British Prime Ministers | University of Oxford. [Www.ox.ac.uk.](https://www.ox.ac.uk/) <https://www.ox.ac.uk/about/oxford-people/british-prime-ministers>

VOA. (2015, December 18). Britain's Last Deep Coal Mine Closes. VOA. <https://www.voanews.com/a/britains-last-deep-coal-mine-closes/3108889.html>

Vuong, B. 2018, November. IBISWorld industry report OD5381. Coffee shops in Australia. Retrieved from IBISWorld database.

Webber, E. (2021, July 13). UK MPs back Boris Johnson's foreign aid cut despite outcry. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/uk-mps-back-boris-johnsons-foreign-aid-cut/>

WHO. (2022). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Covid19.Who.int. <https://covid19.who.int/region/euro/country/gb>

Williams, P. (2004). Who's making UK foreign policy? *International Affairs*, 80(5), 911–929. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2004.00425.x>